

# PENGADILAN TINGGI MAKASSAR



## RENCANA AKSI TAHUN 2024



## RENCANA AKSI TAHUN 2023

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Triwulan			
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	I	II	III	IV
1.	<i>Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tinggi Makassar</i>	<i>Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</i>	98	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100
					b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100
					c. Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100
					d. Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	52	52	52	52
					e. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	90	90	90	90
2.	<i>Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Makassar</i>	<i>Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu</i>	97	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	98	98	98	98
					b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	98	98	98	98
					c. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	98	98	98	98

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
<b>1.1 Indikator : Penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu</b>									
1	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara perdata yang lebih dari 3 bulan.	√	√	√	√	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara perdata	penegakkan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Sumber dana berasal dari Biaya Proses Pihak Berperkara
2	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat	√	√	√	√	terdatanya jumlah perkara perdata yang lebih dari 3 bulan	penegakkan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
3	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan	√	√	√	√	terlaksananya persidangan cepat, sederhana dan berbiaya ringan	penegakkan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
4	Menunda persidangan tidak terlalu lama (maksimal 2 minggu)	√	√	√	√	jarak penundaan sidang yang tidak terlalu lama	penegakkan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
5	Memutus perkara perdata tidak melebihi 3 bulan	√	√	√	√	perkara perdata yang diputus	penegakkan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
6	Mencoret perkara perdata yang sudah melebihi batas waktu teguran	√	√	√	√	perkara perdata yang sudah melebihi batas waktu	penegakkan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
<b>1.2 Indikator : Penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu</b>									
1	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara pidana yang lebih dari 3 bulan.	√	√	√	√	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara pidana	penegakkan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Rp.277.919.000,-
2	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat	√	√	√	√	terdatanya jumlah perkara pidana yang lebih dari 3 bulan	penegakkan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
3	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan	√	√	√	√	terlaksananya persidangan cepat, sederhana dan berbiaya ringan	penegakkan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
4	Menunda persidangan tidak terlalu lama (maksimal 2 minggu)	√	√	√	√	jarak penundaan sidang yang tidak terlalu lama	penegakkan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
5	Memutus perkara perdata tidak melebihi 3 bulan	√	√	√	√	perkara pidana yang diputus	penegakkan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
6	Mencoret perkara perdata yang sudah melebihi batas waktu teguran	√	√	√	√	perkara pidana yang sudah melebihi batas waktu	penegakkan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	

1.3 Indikator : Penyelesaian perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu									
1	Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara tipikor yang lebih dari 3 bulan.	√	√	√	√	Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara pidana tipikor	penegakkan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Rp.27.620.000
2	Melaporkan dan mencari solusi yang tepat	√	√	√	√	terdatanya jumlah perkara pidana tipikor yang lebih dari 3 bulan	penegakkan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
3	Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan	√	√	√	√	terlaksananya persidangan cepat, sederhana dan berbiaya ringan	penegakkan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
4	Menunda persidangan tidak terlalu lama (maksimal 2 minggu)	√	√	√	√	jarak penundaan sidang yang tidak terlalu lama	penegakkan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
5	Memutus perkara perdata tidak melebihi 3 bulan	√	√	√	√	perkara pidana tipikor yang diputus	penegakkan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
6	Mencoret perkara perdata yang sudah melebihi batas waktu teguran	√	√	√	√	perkara pidana tipikor yang sudah melebihi batas waktu	penegakkan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
1.4 Indikator : Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi									
1	Menyusun putusan perkara tingkat banding yang berkualitas	√	√	√	√	putusan perkara tingkat banding yang berkualitas	penegakkan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Rp. 22.300.000,-
2	Mendata perkara yang tidak melakukan upaya hukum kasasi pada pengadilan tingkat pertama	√	√	√	√	terdatanya perkara perdata, pidana, dan pidana khusus yang tidak melakukan upaya hukum kasasi pada pengadilan tingkat pertama	penegakkan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
1.5 Indikator : Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan									
1	Membentuk tim survey kepuasan masyarakat	√	√	√	√	terbentuknya tim survey	dukungan manajemen	pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi	Rp.38.188.936.000,-
2	Menyusun job description tim evaluasi kepuasan masyarakat	√	√	√	√	Job description tim SKM	dukungan manajemen	pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi	
3	Menyusun jadwal pelaksanaan dan kebutuhan survey kepuasan masyarakat	√	√	√	√	jadwal dan perangkat SKM	dukungan manajemen	pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi	

4	Melaksanakan SKM (secara manual atau menggunakan aplikasi)	√	√	√	√	kuesioner SKM	dukungan manajemen	pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi
5	Mendata dan merekap hasil SKM	√	√	√	√	data hasil SKM	dukungan manajemen	pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi
6	Menyusun laporan SKM	√	√	√	√	laporan SKM	dukungan manajemen	pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi
7	Melakukan evaluasi berdasarkan hasil SKM dan menindaklanjuti hasil survey	√	√	√	√	laporan tindaklanjut hasil survey	dukungan manajemen	pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
<b>2.1</b>	<b>Indikator : salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu</b>								
1	Menginput tundaan sidang setelah dilaksanakan	√	√	√	√	Jadwal sidang	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Dana bersumber dari biaya proses pihak berperkara
2	Membuat berita acara sidang setelah sidang dilaksanakan	√	√	√	√	BAS	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
3	Membuat putusan sebelum sidang pembacaan putusan	√	√	√	√	Putusan	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
4	Menginput amar putusan dana tanggal putusan di SIPP maksimal 1 hari setelah sidang putusan	√	√	√	√	Data putusan di SIPP	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
5	Mengunggah salinan putusan ke SIPP (e doc)	√	√	√	√	e-doc salinan putusan	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
6	Mengirimkan salinan putusan ke pengadilan negeri pengaju paling lambat 14 hari, dan selanjutnya menginput tanggal pengiriman salinan putusan ke SIPP	√	√	√	√	Dokumen salinan putusan dan tanggal salinan putusan	Program dukungan penegakkan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
7	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan	√	√	√	√	Hasil evaluasi	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
<b>2.2</b>	<b>Indikator : Salinan putusan perkara pidana yang dikirim tepat waktu ke pengadilan negeri pengaju</b>								
1	Menginput tundaan sidang setelah dilaksanakan	√	√	√	√	Jadwal sidang	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Rp.29.481.000,-
2	Membuat berita acara sidang setelah sidang dilaksanakan	√	√	√	√	BAS	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
3	Membuat putusan sebelum sidang pembacaan putusan	√	√	√	√	Putusan	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
4	Menginput amar putusan dana tanggal putusan di SIPP maksimal 1 hari setelah sidang putusan	√	√	√	√	Data putusan di SIPP	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
5	Mengunggah salinan putusan ke SIPP (e-doc)	√	√	√	√	e-doc salinan putusan	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	

6	Mengirimkan salinan putusan ke pengadilan negeri pengaju paling lambat 14 hari, dan selanjutnya menginput tanggal pengiriman salinan putusan ke SIPP	√	√	√	√	Dokumen salinan putusan dan tanggal salinan putusan	Program dukungan penegakkan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
7	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan	√	√	√	√	Hasil evaluasi	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
<b>2.3</b>	<b>Indikator : Salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim tepat waktu ke pengadilan negeri pengaju</b>								
1	Menginput tundaan sidang setelah dilaksanakan	√	√	√	√	Jadwal sidang	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Rp.4.100.000,-
2	Membuat berita acara sidang setelah sidang dilaksanakan	√	√	√	√	BAS	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
3	Membuat putusan sebelum sidang pembacaan putusan	√	√	√	√	Putusan	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
4	Menginput amar putusan dana tanggal putusan di SIPP maksimal 1 hari setelah sidang putusan	√	√	√	√	Data putusan di SIPP	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
5	Mengunggah salinan putusan ke SIPP (e-doc)	√	√	√	√	e-doc salinan putusan	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
6	Mengirimkan salinan putusan ke pengadilan negeri pengaju paling lambat 14 hari, dan selanjutnya menginput tanggal pengiriman salinan putusan ke SIPP	√	√	√	√	Dokumen salinan putusan dan tanggal salinan putusan	Program dukungan penegakkan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	
7	Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan	√	√	√	√	Hasil evaluasi	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	

Makassar, 7 Februari 2023

KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,



Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.